

KATA PENGANTAR

PROFESI GURU MEMASUKI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Dr. Yohanes Servatius Boy Lon, M.A.
Ketua Sekolah STKIP St. Paulus Ruteng

Restorasi ekonomi sebagai kekuatan untuk membangkitkan tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia akhir-akhir ini mendapat muaranya pada apa yang disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA merupakan gerakan bersama negara-negara kawasan Asia Tenggara untuk kesejahteraan semua anggotanya. Spirit ekonomi regionalisasi ASEAN ini bercita-cita untuk membangun kekuatan kawasan yang tangguh dan produktif. Cita-cita MEA sejalan dengan visi Indonesia 2045, yakni terciptanya "generasi emas Indonesia". Generasi emas menunjuk suatu prediksi statistikal bahwa pada tahun 2045 nanti Indonesia akan mengalami "bonus demografi", sebuah kondisi populasi usia produktif berada pada level amat besar. Kandungan bonus demografi ini diharapkan bersifat unggul, produktif, dan kompetitif, persis karakter SDM yang dituntut MEA. Mohammad Nuh, mantan Mendikbud RI, mengharapkan agar bonus demografi itu harus bersifat produktif, menguntungkan, bukan kontraproduktif, membawa petaka (Indratno, 2013: x). Untuk mencapai cita-cita tersebut bangsa kita pasti melewati jalan berat yang berliku-liku di tengah kondisi sosiodemografis yang kompleks.

SDM Indonesia Menghadapi MEA

MEA dipercepat pada 2015 meskipun awalnya direncanakan akan direalisasikan pada tahun 2020. MEA mendorong kompetitif terbuka. Masalah yang berat untuk Indonesia adalah kompetisi yang lemah, baik kompetisi produk maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Kualitas daya saing produk Indonesia masih tertinggal dari segi inovasi dan teknologi. Produk yang dipasarkan Indonesia masih bertumpu pada sumber daya alam. Indonesia mengandalkan ekspor barang mentah.

Perhatikan ekspor produk pertambangan PT Freeport di Jayapura selama ini berkesat dengan bahan mentah. Kualitas SDM juga menjadi masalah yang serius. Padahal SDM merupakan variabel yang turut menentukan pertumbuhan ekonomi. Seperti dikatakan Chairul Tanjung (Widodo, 2015: 3), pertumbuhan ekonomi riil ditentukan oleh tiga faktor utama, yakni pertumbuhan tenaga kerja, pertumbuhan modal, dan pertumbuhan faktor produksi. Tenaga kerja dan faktor produksi juga ditentukan oleh kualitas SDM. Oleh karena itu, dalam RPJM ke-2 (2010-2014) pemerintah Indonesia memberikan perhatian pada upaya peningkatan kualitas SDM agar memiliki daya saing. Kurangnya mutu SDM Indonesia tergambar dalam beberapa data Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*), di mana Indonesia berada pada urutan ke 123 dari 209 negara dengan kategori *medium human development*. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, ranking Indonesia berada jauh di bawah Thailand, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura.

Tabel 1
Human Development Index Negara ASEAN

No	Negara	Ranking	Kategori
1.	Singapore	11	Very High Human Development
2.	Brunei Darussalam	31	Very High Human Development
3.	Malaysia	73	High Human Development
4.	Thailand	104	Medium Human Development
5.	Indonesia	123	Medium Human Development
6.	Filipina	127	Medium Human Development
7.	Vietnam	130	Medium Human Development
8.	Laos	153	Medium Human Development
9.	Kamboja	155	Medium Human Development
10.	Myanmar	161	Low Human Development

Sumber: UNDP (2015)

Lemahnya kualitas SDM Indonesia juga dapat dilihat dari data perolehan skor PISA (*Program for International Student Assessment*) tahun 2012 yang mengukur kemampuan anak usia 15 tahun di bidang matematika, sains, dan membaca. Perolehan skor PISA anak-anak Indonesia berada pada peringkat ke-64 dari 65 negara. Perolehan ini sangat buruk dari skor PISA sebelumnya walaupun masih berada pada 5

besar terendah. Padahal peringkat 10 besar PISA 2012 didominasi oleh negara-negara di Asia, yakni Shanghai menempati ranking pertama, diikuti Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, Makau, dan Jepang (Kompas, 5 Desember 2013). Hal ini menjadi tantangan yang cukup berat menghadapi MEA.

Data-data di atas hanya menceritakan sebagian kecil dari persoalan kualitas SDM Indonesia yang rumit. Diperlukan upaya yang serius untuk meningkatkan kualitas SDM. Jika MEA diberlakukan dan tidak ditangani segera, Indonesia akan menjadi budak di negeri sendiri. Sebab aliran tenaga kerja asing, khususnya dari negara-negara ASEAN, bakal membanjiri pasar tenaga kerja Indonesia. Jalur yang strategis adalah melalui pendidikan dan guru memiliki peran yang amat besar.

Respon Dunia Pendidikan

Upaya peningkatan SDM Indonesia telah ditetapkan dalam RPJM ke-2 tahun 2010-2014. Upaya ini tidak dapat dilepaskan dari peran guru. Guru adalah ujung tombak dalam menghasilkan SDM yang berkualitas dan kompetitif. Guru terlibat langsung dalam proses pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, ia memiliki peran yang sangat vital dalam meningkatkan kualitas anak didiknya. Menteri Koordinator Ekonomi, Darmin Nasution (Tempo, 25 Juni 2014) menegaskan bahwa peningkatan standar kompetensi SDM Indonesia mendesak untuk dilakukan dalam menghadapi pelaksanaan MEA karena menuntut persaingan di sektor jasa yang membutuhkan tenaga profesional yang andal. Peranan guru dalam menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tidak dapat diragukan lagi. Mereka adalah aktor-aktor perubahan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

Perekonomian yang baik akan dicapai karena dikendalikan oleh SDM bermutu tinggi. SDM yang bermutu hanya dapat dicapai melalui sistem pendidikan yang berkualitas. Pendidikan berkualitas akan menghasilkan manusia yang handal, berakhlak mulia, mampu bekerja sama dan bersaing di era globalisasi dengan tetap mencintai tanah air. Dalam TAP MPR No. 7/2001 dikatakan bahwa visi Indonesia tahun 2020 adalah "keinginan untuk maju" sehingga diperlukan upaya-upaya yang salah satunya adalah meningkatkan kualitas pendidikan untuk

memperoleh tenaga berkompeten sesuai standar nasional dan internasional (Tilaar, 2009: 302).

Dalam kaitan dengan MEA, Faisal Basri (Tempo, 25 Juni 2014) pernah menyatakan bahwa agar bisa bersaing peningkatan kualitas SDM harus dimulai dari proses pendidikan. Untuk menciptakan SDM yang unggul, produktif, dan kompetitif, pendidikan memiliki peran yang amat strategis. Nuh (Indratno, 2013: ix) menyatakan bahwa pendidikan berperan sebagai sistem rekayasa sosial terbaik. Pendidikan harus berdaya transformatif, yakni mengubah segala potensi bangsa menjadi kekuatan yang dapat digunakan dalam membangun bangsa pada berbagai sektor menuju kondisi yang ideal. Hal senada juga dinyatakan Boediono (Indratno, 2013: 5) bahwa kendatipun kemajuan bangsa ditentukan oleh kekuatan institusi melalui interaksi positif sektor politik dan ekonomi, pada akhirnya institusi itu pun ditentukan oleh pendidikan. Pendidikan memiliki andil besar yang menentukan kualitas manusia yang melaksanakan fungsi institusi. Pendidikan berperan mengembangkan *soft skills* dan *hard skills* yang amat dibutuhkan dalam membangun bangsa.

Inilah tantangan besar bagi guru bagaimana mempersiapkan diri di era kompetisi regional. Tampak sulit dan butuh energi ekstra untuk melaju sesuai impian ketika kita melihat realitas dunia pendidikan masih dicerai rupa-rupa persoalan seperti kompetisi tenaga pendidik yang rendah, sindrom *mismanagement*, landasan filosofis yang tambal sulam, manajemen yang rapuh, dan pergantian kurikulum yang fluktuatif. Guru sendiri sebagai aktor perubahan sedang mengalami masalah berat. Dari data yang diperoleh dapat dilihat setidaknya ada dua persoalan serius guru Indonesia sekarang ini. Kedua persoalan itu adalah profesionalisme yang masih rendah dan kompetensi guru yang memprihatinkan. Jika guru adalah variabel yang memiliki pengaruh besar terhadap prestasi siswa, maka tidak mengherankan jika prestasi anak Indonesia dalam kompetisi internasional seperti PISA sangat buruk. Artinya kedua masalah tersebut diasumsikan berpengaruh langsung terhadap kualitas SDM Indonesia.

Pertama, masalah profesionalisme guru. Hingga tahun 2015, hampir semua guru di Indonesia tersertifikasi (Kemdikbud, 2015).

Kendatipun demikian sertifikasi guru belum berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Ditjen PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan) sebagaimana dikutip Payong (2011: 89) setidaknya menemukan tiga hal yang menarik perhatian. 1) Sertifikasi belum membawa dampak terhadap peningkatan profesionalisme guru, kecuali peningkatan kesejahteraan. 76% dana tunjangan profesi dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga guru. 2) Sertifikasi juga belum berdampak pada peningkatan penghargaan terhadap status guru sebagai profesi yang dapat dibanggakan oleh guru itu sendiri. Masih ada 24% guru menjalankan aktivitas sebagai guru privat, 20% guru masih berwirausaha, dan 38% masih melakukan aktivitas sebagai petani. 3) Sertifikasi guru belum berdampak pada peningkatan disiplin guru dalam menjalankan tugas profesinya. 45% guru tersertifikasi sering tidak masuk sekolah.

Ketiga temuan tersebut memperlihatkan ketidakefektifan program sertifikasi guru yang telah dilakukan melalui penilaian portofolio dan PLPG. Selain itu, disinyalir bahwa pemberian sertifikat pendidik profesional tidak melalui *assessment* yang autentik dan objektif. Dana tunjangan sertifikasi guru selama ini mestinya tidak lebih dari penghargaan atas pengabdian guru selama belasan dan puluhan tahun, bukan tunjangan dengan fungsi menopang guru dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Kedua, kompetensi guru juga menjadi masalah yang amat serius. Data hasil UKG tahun 2015 menunjukkan rendahnya kompetensi guru Indonesia setidaknya dilihat dari kompetensi pedagogik dan profesional. Kompetensi pedagogik menunjuk pada kemampuan guru melaksanakan pembelajaran berbasis pada pemahaman karakteristik siswa, penguasaan metodologi pembelajaran, dan filosofi pendidikan yang sedang dianut dalam suatu sistem pendidikan. Sedangkan kompetensi profesional bertalian dengan penguasaan bidang keahlian, yakni penguasaan materi pelajaran, pemahaman ontologi, epistemologi, dan aksiologi bidang ilmu yang didalami. Hasil UKG tahun 2015 memperlihatkan nilai rata-rata yang diperoleh secara nasional adalah 53,02. Perolehan ini berada di bawah standar yang ditetapkan, yakni rata-rata 55 untuk kompetensi pedagogik dan profesional. Bahkan rata-

rata untuk kompetensi pedagogik lebih rendah lagi, yakni 48,94 (Kemdikbud, 2016).

Selain kedua masalah tersebut, Payong (2016: 16), dalam penelitiannya pada tahun 2014 menemukan sejumlah persoalan guru, sebagai berikut. 1) Para guru belum siap menerapkan inovasi pembelajaran, mereka cenderung kembali kepada pola-pola pembelajaran konvensional. 2) Program peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru tidak berdampak secara langsung terhadap peningkatan prestasi siswa. 3) Program pengembangan keprofesian berkelanjutan tidak dilihat sebagai program strategis yang memiliki nilai tambah pada pengayaan wawasan dan keterampilan guru. 4) Guru terlibat politik praktis dalam pilkada langsung yang berpengaruh pada kinerjanya dalam pembelajaran dan hubungan sejawat. 5) Guru terjebak dalam pola pikir birokratis dalam menerapkan kurikulum. 6) Dorongan dan kemauan untuk belajar dan mengembangkan diri belum diutamakan oleh guru-guru yang telah disertifikasi.

Beberapa Pertimbangan

Sejumlah persoalan guru di atas mestinya tidak dibiarkan. Upaya peningkatan profesionalisme guru harus segera dilakukan. Guru harus belajar terus-menerus agar menjadi lebih profesional. Setidaknya ada dua alasan perlunya peningkatan profesionalisme guru.

Pertama, zaman terus berubah. Perubahan ini ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Pesatnya perkembangan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan informasi menyebabkan semua orang bisa memperoleh pengetahuan dengan lebih mudah, kapan dan di manapun. Akses terhadap ilmu pengetahuan tidak hanya dapat dilakukan oleh guru, melainkan juga oleh para siswa. Jangan sampai siswa lebih menguasai informasi baru daripada gurunya. Oleh karena itu, guru harus belajar untuk meningkatkan kualitas dirinya, sehingga tidak ketinggalan.

Kedua, pada era MEA liberalisasi aliran barang, jasa, modal, dan juga tenaga kerja menghadirkan persaingan. Liberalisasi tenaga kerja dapat diartikan bahwa semua warga negara ASEAN dapat bekerja di mana saja tanpa hambatan dari negara yang dituju. Tantangan terberat

bagi guru adalah bagaimana menghasilkan tenaga kerja yang unggul, produktif, dan kompetitif. Untuk menghasilkan SDM tenaga kerja yang memiliki kualifikasi seperti itu, maka guru harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kualitas guru merupakan jaminan kualitas SDM Indonesia sehingga memiliki daya saing dengan SDM negara-negara anggota ASEAN lainnya.

Chatib (2011: xviii) menyatakan bahwa ada tiga kekuatan utama guru dalam pembelajaran, yakni paradigma, cara, dan komitmen. Paradigma merupakan sudut pandang atau suatu konsepsi yang berisi asumsi-asumsi teoritik dan mendasari pelaksanaan pembelajaran. Cara menunjuk pada metode atau teknik-teknik yang digunakan guru dalam pembelajaran. Sedangkan komitmen merupakan suatu sikap dan ketetapan hati untuk menjalankan tugas profesi secara konsisten. Ketiga kekuatan inilah yang dikembangkan bersamaan dengan pengembangan kompetensi profesional guru.

Peningkatan profesionalisme guru berorientasi pada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan arah pengembangan profesi guru yang dipandang tepat. Pengembangan tidak dilakukan secara insidental, melainkan secara kontinyu dan variatif. Menurut Masyhud (2012: 23) pengembangan keprofesian guru berkelanjutan memiliki tujuan sebagai berikut: 1) meningkatkan kompetensi guru, 2) memutakhirkan kompetensi guru, 3) meningkatkan komitmen guru, 4) menumbuhkan rasa cinta terhadap profesi guru, dan 5) meningkatkan citra, harkat, dan martabat guru di masyarakat.

Menurut Day (Payong, 2011: 19) pengembangan profesional berkelanjutan terdiri dari semua pengalaman belajar alamiah dan kegiatan-kegiatan yang sengaja direncanakan untuk memberikan manfaat langsung kepada guru-guru maupun kualitas pembelajaran di kelas. Secara individu pengembangan keprofesian berkelanjutan dilakukan melalui inisiatif guru sendiri dengan melakukan refleksi dan PTK, membaca jurnal-jurnal ilmiah, memperluas jaringan kerja, meningkatkan koleksi perpustakaan pribadi. Sebaliknya pengembangan keprofesian berkelanjutan dapat pula dilakukan oleh kepala sekolah melalui program-program sekolah seperti *training day*, kunjungan ke

sekolah lain, atau mengundang narasumber dari sekolah atau instansi lain. Kolaborasi dengan guru lain pun dapat dilakukan melalui *team teaching*, analisis masalah bersama guru lain, bedah artikel bersama, dan *lesson study*.

On Going Formation: Harus Lahir Dari Kehendak Guru

On Going Formation merupakan istilah lain yang sering digunakan untuk menunjuk pada proses pembentukan yang dilakukan secara terus-menerus. Istilah ini memiliki makna yang sama dengan pengembangan berkelanjutan. Dalam konteks pengembangan profesi guru, istilah tersebut menunjuk pada pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Istilah *on going formation* di sini diambil dari salah satu topik yang ditulis Drost (1998: 241-244) dalam bukunya berjudul "Sekolah: Mengajar atau Mendidik?" Tulisan tersebut pernah dimuat dalam harian umum Kompas, 2 Oktober 1995. Tulisan ini lebih merupakan kritik Drost atas program pelatihan atau penataran yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Baginya, penataran tidak dapat dimaknai dalam pengertian *on going formation* karena beberapa alasan. *Pertama*, seringkali penataran dilakukan secara terpaksa. Para guru yang mengikuti pelatihan melepas pelajarannya, sehingga diliputi rasa cemas tidak bisa mengejar ketertinggalan. Jika ini yang terjadi maka bukan proses pembentukan yang dialami, melainkan penjejalan.

Kedua, penataran acapkali dilakukan seperti *remedial teaching* para guru untuk mengejar kekurangan akibat studi yang tidak bermutu. Penataran dilakukan sebagai usaha menutupi kekurangan karena studi yang tidak beres. Teknik penataran seringkali dilakukan secara maraton seperti penjejalan bahan, sehingga materi penataran mudah dilupakan.

Menurut Drost, *on going formation* merupakan kegiatan yang secara sukarela dilakukan oleh guru tanpa paksaan dari pihak lain. Guru mengambil waktu khusus untuk belajar dengan membaca buku, mengikuti kursus, lokakarya atau seminar. Itu artinya, *on going formation* merupakan suatu pengalaman, yakni hasil sikap tanggap terhadap kondisi yang dialami. Guru secara bebas dan sukarela belajar didasarkan pada sikap tanggap terhadap perubahan yang terjadi yang berpengaruh

terhadap tugas profesionalnya. Dengan demikian, *on going formation* yang bermakna adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dilakukan secara individual atas dasar kesadaran guru sendiri.

Menghadapi MEA, guru dituntut untuk meningkatkan profesionalisme. Profesionalisme tidak hanya berurusan dengan kecakapan akademis namun juga etos atau etika profesinya. Lebih jauh bagaimana etika profesi guru harus dihidupi, buku "Etika dan Tantangan Profesionalisme" ini mengupas lebih tajam dan komprehensif. Buku karya dosen-dosen STKIP St. Paulus Ruteng ini baik untuk dibaca. Olahannya mudah dicerna mulai dari teori-teori hingga contoh-contoh praktis sehingga layak dijadikan buku referensi para pengajar di perguruan tinggi, sekolah dasar dan menengah, para mahasiswa yang ingin menjadi guru, dan para pencinta dunia pendidikan.

Saya sangat menaruh hormat pada siapa pun yang berjuang untuk memperbaiki citra para guru baik melalui aksi nyata di lapangan maupun ide-ide kreatif lewat tulisan-tulisan. Profesi guru masa kini tidak lagi gampang dilakukan. Persoalan yang makin kompleks dan intensif baik di lingkungan pendidikan maupun lingkungan sosial secara luas selalu mengarah pada guru. Hal ini didasari kenyataan bahwa tugas guru adalah mendidik dan mendidik itu sendiri adalah *civilized*, artinya proses humanisasi manusia, maka dalam perspektif *civilized*, mendidik pastilah *human oriented*, tertuju kepada manusia sebagai insan bermoral. Proses humanisasi itu sangat sulit karena tidak hanya berkaitan dengan humanisasi individu-individu melainkan juga situasi-situasi sebagai latarnya.

Untuk sampai pada proses sivilisasi, guru harus berbenah diri. Jika ia ingin menunjukkan diri sebagai pemandu jalan yang berada di depan anak didik, guru harus betul-betul menjadi teladan dalam tugas profesionalnya. Siswa mengharapkan guru menjadi objek identifikasi dan imitasi dirinya. Tidak berlebihan jika dikatakan guru sebagai seorang profesional harus beretika. Etika keguruan tidak boleh sebatas wacana di bangku kuliah atau diskusi di jajaran para elite, melainkan harus sungguh-sungguh menyata dalam perilaku konkret, pedoman,

nilai, dan spirit kehidupan guru. Memang seiring diperhatikannya etika dan profesi keguruan, makin banyak pula tanggung jawabnya, namun makin besar pula persoalan yang harus dipikul.

Akhir kata, saya menyambut baik kehadiran buku ini dengan harapan semoga dapat menambah khazanah pengetahuan dan referensi bagi para akademisi, pengajar, mahasiswa, dan pencinta bidang keguruan. Terima kasih kepada ketua dan staf Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STKIP St. Paulus Ruteng atas dukungan moral dan material dalam penerbitan buku ini. Juga kepada penerbit Alfabeta Bandung yang berbaik hati karena menerbitkan karya kami. Semoga jasa-jasa Anda selalu diberkati.